



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

HAK WARIS ANAK DARI WATHA' SYUBAHAT PERSPEKTIF FIQIH KONTEMPORER

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi
Syarat- Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

DENI PUTRA
NIM. 11721100454

JURUSAN HUKUM KELUARGA (AH)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU-PEKANBARU

2021 M/1443 H



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **“HAK WARIS ANAK DARI WATHI’ SYUBAHAT PERSPEKTIF FIQIH KONTEMPORER”**, yang ditulis oleh :

NAMA : DENI PUTRA

NIM : 11721100454

PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 juli 2021

Pembimbing Skripsi,

UIN SUSKA RIAU

Hairul Amri M.Ag
NIP. 19730623 2001121003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“HAK WARIS ANAK HASIL WATHA’ SYUBAHAT PERSFEKTIF FIQIH KONTEMPORER”**, yang ditulis oleh:

Nama : DENI PUTRA
 NIM : 11721100454
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Jumat, 06 Agustus 2020
 Waktu : 08.30 WIB
 Tempat : Daring

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 06 Agustus 2020

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H.Akmal Abdul Munir, Lc, MA

Sekretaris

Yuni Harlina, M.Sy

Penguji I

Dr. H. Suhayib, M.Ag

Penguji II

Dr. H. Johari, M.Ag



Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Zuikifli, M.Ag.

NIP. 197410062005011005



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Deni Putra (2021) : Hak Waris Anak Dari Watha' Syubahat Perspektif Fiqih Kontemporer

Penelitian ini berjudul “(Hak Waris Anak Dari Watha' Syubahat Perspektif Fiqih Kontemporer)” perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia. Permasalahan yang muncul ketika terjadi watha' syubahat dalam segi perbuatan sehingga menyebabkan lahirnya seorang anak bagaimana dampak pada anaknya, yaitu seperti halnya status dan hak waris anak tersebut. Pokok masalah pada penelitian ini adalah bagaimanakah Status Hak Waris Anak Dari watha' syubahat Perspektif Fiqih Kontemporer? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami hak waris anak hasil watha' syubahat perspektif fiqih kontemporer.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan melakukan kajian library research, data dikumpulkan dengan menggunakan data pustaka berupa buku-buku sebagai sumber datanya. Teknik pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan pendekatan syar'ii. Penelitian ini dalam dua konsentrasi yaitu, pendapat ulama kontemporer terhadap watha' syubahat, Implikasi watha' syubahat terhadap kewarisan ?

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat dalam penulisan sekripsi ini dapat di simpulkan bahwa ulama kontemporer menyatakan anak hasil watha' syubahat dalam segi perbuatan di nasabkan kepada laki-laki yang mewatha' ibunya secara syubahat, maka dari itu anak hasil watha' syubahat berhak mendapatkan warisan seperti hal anak sah karena anak tersebut di nasabkan kepada ayahnya.

Kata Kunci: hak waris anak, watha' syubahat



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin. Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya. Shalawat beriringan salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda kita Nabi Muhammad Saw. dimana atas berkat perjuangan beliau lah kita merasakan kenikmatan yang tidak terhingga yakni iman dan Islam sebagaimana yang telah kita rasakan sekarang ini sampai akhir hayat nanti. Skripsi ini berjudul **"HAK WARIS ANAK DARI WATHA' SYUBAHAT PERSPEKTIF FIQIH KONTEMPORER"**

skripsi ini masih banyak kekurangan baik itu dalam penulisan maupun pelaksanaannya. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi S1 Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dan semua itu tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik itu berbentuk moril maupun materil. Oleh sebab itu, dengan setulus hati penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Keluarga tercinta, ayahanda (Tarmizi), ibunda (Darniati), yang telah memberikan dukungan, juga bimbingan, dan selalu mendoakan tiada henti serta kasih sayang sekaligus pengorbanan baik secara moril maupun materil demi keberhasilan penulis dalam menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Erman ,M.Ag selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Mawardi, S.Ag.,M.Si, selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag, selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak H. Akmal Abdul Munir, Lc.MA, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Bapak Ade Fariz Fahrullah M.Ag, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Bapak Hairul Amri M.Ag, selaku dosen pembimbing. Terimakasih atas semua waktu, bimbingan serta arahan yang telah bapak berikan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam menyelesaikan penelitian ini.
10. Seluruh bapak dan ibu dosen yang telah memberikan bekal ilmu yang tidak ternilai selama mengikuti bangku perkuliahan di Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
11. Teman-teman golak mosamo terkhusus roni, fazri, ami, ryan, syahbiq, Ali yang telah memotivasi membuat penulis skripsi menjadi bersemangat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

untuk bersemangat melanjutkan skripsi dengan nuansa kebersamaan yang di berikan.

12. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga angkatan 2017 terimakasih atas segala motivasi dan juga saran selama penulisan skripsi ini.

13. Trimakasih juga untuk Maya Sartika yang insya allah akan menyandang gelar St, semangat selalu meskipun itu berat tetap berusaha dan berdoa.

14. Terkhusus untuk Husna Latifah yang akan menyusul gelar S,Ag terimakasih banyak atas support, saran, motivasi dan dukungannya semangat selalu yah jangan pernah menyerah insya allah setelah lelah akan ada kata sah yang diawali dengan bismillah .

Tiada makhluk yang sempurna di dunia ini, termasuk penulis yang pastinya tidak luput dari kesalahan dan khilaf. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan skripsi ini ke depannya. Harapan penulis semoga penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang bermanfaat, serta perkembangan keilmuan Hukum Keluarga dan aplikasinya pada masyarakat.

Pekanbaru, 19 Juni 2021
Penulis,

DENI PUTRA
NIM. 11721100454



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian	7
F. Teknik Pengumpulan Data	9
G. Teknik Analisis Data	9
H. Sistematika Penulisan	11
BAB II HUBUNGAN KEWARISAN MENURUT HUKUM ISLAM	
A. Pengertian dan Sumber Hukum	13
B. Pengertian Hukum Waris.....	17
C. Unsur-unsur hukum waris dalam islam	19
D. Syarat-syarat Mawaris	20
E. Sebab-sebab Mawaris	21
F. Faktor Penghalang Kewarisan	23
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK	
A. Pengertian Anak Menurut Hukum Islam.....	37
B. Pengertian Anak Luar Kawin Menurut Islam.....	42
C. Kedudukan anak menurut hukum islam	48
BAB IV HAK WARIS ANAK HASIL WATHI' SYUBAHAT	
PERSPEKTIF FIQIH KONTEMPORER	
A. Pendapat ulama kontemporer terhadap hak anak hasil <i>wathi'</i> <i>syubahat</i>	56
B. Implikasi <i>wathi' syubahat</i> terhadap kewarisan	67



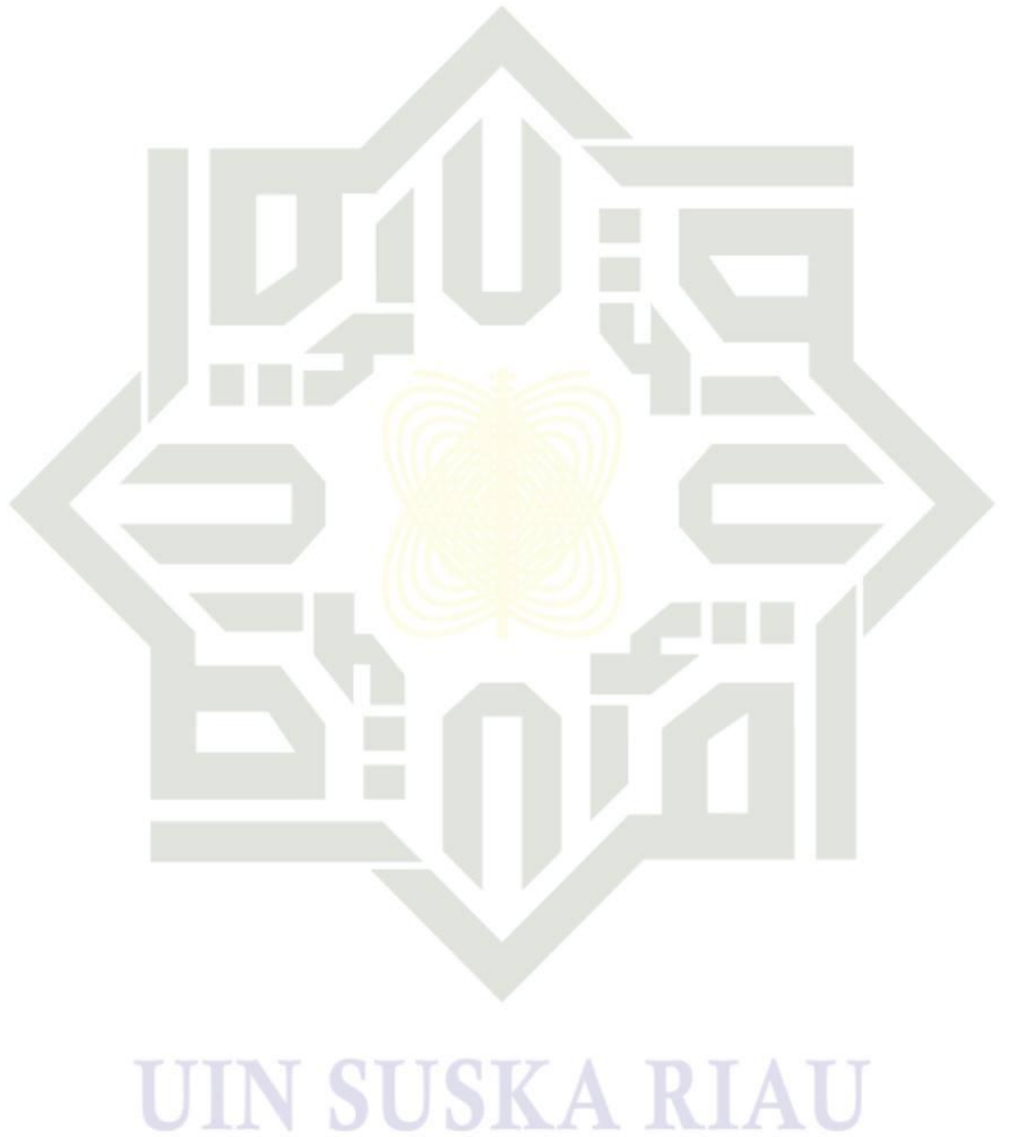
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	66
B. Saran	67

DAFTAR KEPUSTAKAAN
LAMPIRAN





A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).¹

Pernikahan ini sudah menjadi hal yang sakral bagi kehidupan manusia. Pernikahan merupakan sebuah perintah agama. Selain itu pernikahan juga adalah satu-satunya jalan penyaluran seks yang disahkan oleh agama, maka pada saat orang melakukan pernikahan pada saat yang bersamaan dia bukan saja memiliki keinginan untuk melakukan perintah agama, namun juga memiliki keinginan memenuhi kebutuhan biologisnya yang secara kodrat memang harus disalurkan. Agama islam juga telah menetapkan bahwa satu-satunya jalan untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia adalah hanya dengan pernikahan. Suatu keluarga dikatakan bahagia apabila terpenuhi dua kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan jasmani dan rohaniyah, yang termasuk kebutuhan jasmaniah, seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, dan

¹ Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 61.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pendidikan. Sedangkan esensi kebutuhan rohaniah, contohnya adanya seorang anak yang berasal dari darah daging mereka sendiri.² Disinilah dirasakan pentingnya keberadaan anak dalam suatu lingkungan keluarga. Keberadaan anak ini memiliki arti yang berbeda bagi setiap orang. Seperti halnya, dengan kehadiran anak akan dapat mempengaruhi status sosial sebuah keluarga di tengah masyarakat, dapat menciptakan suasana baru yang lebih indah dalam keluarga, menjadi pewaris dari harta orang tuanya, dan juga dapat lebih mempererat ikatan pernikahan suami istri.

Pernikahan sesungguhnya bukan hanya sekedar sebagai sarana penyaluran kebutuhan seks namun lebih dari itu pernikahan juga menjanjikan perdamaian hidup bagi manusia di mana setiap manusia dapat membangun surga dunia di dalamnya. Semua hal itu akan terjadi apabila pernikahan tersebut benar-benar dijalani dengan cara yang sesuai dengan jalur yang sudah ditetapkan Islam. Selain itu, pernikahan juga ditujukan untuk menjalin hubungan kekeluargaan, meneruskan atau melanjutkan keturunan, sebagai penerus bagi kelangsungan hidup manusia.

Islam telah mengatur mengenai pernikahan, baik itu tentang siapa dengan siapa, bagaimana proses pelaksanaannya dilakukan, serta syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Jika kemudian hari muncul permasalahan yang berkaitan dengan hal di atas, maka suatu akad pernikahan bisa dibatalkan atau juga ditetapkan demi hukum. Meskipun perkawinan telah terpenuhi seluruh rukun dan syarat yang ditentukan belum tentu perkawinan tersebut sah, karena masih tergantung lagi.

² Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), hlm. 62.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Watha' *syubhat* merupakan salah satu penyebab rusak nya suatu perkawinan, yakni apabila terdapat suatu keadaan yang meragukan, apakah persetubuhan itu dilarang atau tidak.

Menurut Wahbah Zuhaili, waṭḥa'" *syubhat* atau waṭi'" *syubhat* merupakan hubungan senggama selain zina, namun juga bukan (hubungan senggama: penulis) dalam bingkai pernikahan yang sah ataupun *fasid*.³ Golongan Syafi'i membagi *syubhat* ini kepada tiga bagian sebagai berikut;

- 1) *Syubhat* dalam objek atau tempat. Contohnya adalah menyetubuhi istri yang sedang haid atau sedang berpuasa, atau menyetubuhi istri pada duburnya.
- 2) *Syubhat* pada dugaan pelaku. Contohnya menyetubuhi wanita yang tidur di kamar seorang suami yang disangka sebagai istrinya, padahal sebenarnya seorang tamu.
- 3) *Syubhat* pada jihat atau aspek hukum. Contohnya nikah tanpa wali. Imam Abu Hanifah membolehkannya, sedangkan ulama lain, seperti Imam Syafi'i tidak membolehkannya., pelaku tidak dikenakan hukuman had.

Golongan Hanafiyah membagi *syubhat* tersebut menjadi dua bagian:

- 1) *Syubhat* dalam perbuatan. Contohnya adalah laki-laki yang menyetubuhi istrinya yang sudah ditalak tiga tetapi masih dalam iddah.
- 2) *Syubhat* dalam tempat atau objek. *Syubhat* ini disebut *syubhatul hukmiyah* atau *syubhatul milk*. Hanafiyah memberikan contoh delapan kasus jarimah

³ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, ed. In, Fiqih Islam: Hak-Hak Anak, Wakaf, Warisan, (terj: Abdul Hayyie al-Kattanie, dkk), jilid 10, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 37.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

zina yang termasuk *syubhatul mahal* (*syubhat* dalam objek). Tujuh kasus diantaranya berkaitan dengan persetubuhan terhadap jaryiah atau hamba sahaya. Akan tetapi karena zaman ini masalah sahaya telah dihapuskan maka hal itu tidak dibicarakan disini. Adapun *syubhat* yang satu lagi adalah menyetubuhi istri yang ditalak bain bil kinayah (dengan sindiran). Dalam hubungan dengan *syubhat* dalam watha' karena adanya akad ini, berikut ini akan dikemukakan contoh beberapa kasus sebagai berikut.

- a) *Wathul Maharim* Adapun yang dimaksud dengan *wathul maharim* adalah menyetubuhi wanita muhrim yang dinikahi.
- b) Persetubuhan dalam pernikahan yang batal.
- c) Persetubuhan dalam pernikahan yang diperselisihkan hukumnya
- d) Persetubuhan karena dipaksa

Para ulama telah sepakat bahwa tidak ada hukuman ha d bagi wanita yang dipaksa untuk melakukan persetubuhan yang dilarang (zina). Dalam hal ini keadaan tersebut dapat digolongkan kepada keadaan darurat.

Setelah menguraikan keterangan yang di atas bahwa hukum adalah ketetapan Allah yang berlaku pada tindakan-tindakan mukallaf dalam kondisi dia berbuat/ bukan dipaksa⁴. Ungkapan Imam An Nawawi pada fatwanya dalam kitab an-nikah "bahwa hukum halal dan haram adalah bagian dari ketentuan-ketentuan dengan tindakan-tindakan mukallaf sedang orang lupa, salah dan sejenis bukanlah kategori orang mukallaf. Memiliki anak bagaimana

⁴ Di dalam Sunan Ibnu Majah No.2045 Tentang. Allah mengampuni Siapa yang tersalah dan terlupa. *إن الله تجاؤز لى عن امتى الخطا و أنسسان وما أستر هوأ علنه* yang artinya sesungguhnya Allah membiarkan (mengampuni) kesalahan umatku akibat kekeliruan dan lupa serta keterpaksaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

dampak pada anaknya, yaitu seperti halnya status ataupun hak waris dari anak tersebut.

Al-Qur'an menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang pun. Bagian yang harus diterima semuanya dijelaskan sesuai kedudukan nasab terhadap pewaris, apakah dia sebagai anak, ayah, istri, suami, kakek, ibu, paman, cucu, atau bahkan hanya sebatas saudara seayah atau seibu.⁵ Sedangkan maknanya waris menurut bahasa ialah 'berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain'. Atau dari suatu kaum kepada kaum lain.⁶ Kata waris terdapat dalam berbagai bentuk, makna tersebut dapat kita temukan dalam Al-Qur'an, yang antara lain:⁷

- a) Mengandung makna "mengganti kedudukan" (QS. al-Naml, 27:16)
- b) Mengandung makna "memberi atau menganugerahkan" (QS. al-Zumar, 39:74)
- c) Mengandung makna "mewarisi atau meminta warisan" (QS. al-Maryam, 19:6)

Dalam istilah umum, waris adalah perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup. Pengertian tersebut sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Wiryono Projodikoro, definisi waris adalah soal apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal akan beralih

⁵ Muhammad Ali Al-Sabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, ter. A.M Basamalah (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm.33.

⁶ Ibid.

⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-4, 2000), hlm. 355.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

kepada orang lain yang masih hidup.⁸ Adapun pengertian hukum kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya (Pasal 171 huruf a KHI).

Berdasarkan permasalahan diatas maka peneliti hendak meneliti mengenai masalah hak waris bagi anak yang orang tuanya melakukan *watha' syubahat*. Dengan itu peneliti mengangkat penelitian ini dengan judul “**HAK WARIS ANAK DARI WATHA' SYUBAHAT PERSPEKTIF FIQIH KONTEMPORER**”.

B. Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah, serta karena keterbatasan waktu biaya dan tenaga. Maka penelitian ini penulis memberi batasan yang berfokus kepada seorang ulama kontemporer yang bernama Wahba Zuhaili. Pada penelitian ini penulis hanya membahas hal-hal yang berkaitan dengan: “**HAK WARIS ANAK DARI WATHA' SYUBAHAT PERSPEKTIF FIQIH KONTEMPORER**”

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka pokok masalah yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat ulama kontemporer terhadap *watha' syubahat*?
2. Bagaimana Implikasi *watha' syubahat* terhadap kewarisan ?

⁸ Wiryono Projodikoro, Hukum Warisan di Indonesia, (Bandung: Sumur, 1983), hlm. 13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui hak waris anak.
- b. Untuk mengetahui status hak waris anak dari *watha' syubahat* perspektif fiqh kontemporer.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk mengembangkan wawasan penulis dan pembaca tentang status hak waris anak hasil *watha' syubahat* yang ditinjau dari fiqh kontemporer.
- b. Untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan Islam khususnya dalam bidang kewarisan.
- c. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi praktisi hukum dalam merumuskan ketetapan-ketetapan hukum.

E. Metode Penelitian

Untuk mencapai hasil yang positif dalam sebuah tujuan, maka metode ini merupakan salah satu sarana untuk mencapai sebuah target karena salah satu metode berfungsi sebagai cara mengerjakan sesuatu hasil yang memuaskan. Di samping itu metode merupakan bertindak terhadap sesuatu dari hasil yang maksimal.⁹

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang mengambil sumber data dari buku-buku

⁹ Anton Bakker. Metode Filsafat (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm.10.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perpustakaan (*library research*). Secara definitif, *library research* adalah penelitian yang dilakukan di perpustakaan dan peneliti berhadapan dengan berbagai macam literatur sesuai tujuan dan masalah yang sedang dipertanyakan.¹⁰ Sedangkan deskriptif adalah menggambarkan apa adanya suatu tema yang akan dipaparkan. Kemudian dengan cara mengumpulkan buku-buku atau referensi yang relevan dan akurat, serta membaca dan mempelajari untuk memperoleh sebuah data atau kesimpulan yang berkaitan dengan pembahasan tersebut majalah, atau karya ilmiah lainnya.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini sesuai dengan jenis penggolongannya ke dalam penelitian perpustakaan (*library research*), maka sudah dapat dipastikan bahwa data-data yang dibutuhkan adalah dokumen, yang berupa data-data yang diperoleh dari perpustakaan melalui penelusuran terhadap buku-buku literatur, baik yang bersifat primer ataupun yang bersifat sekunder.¹¹ Pada penelitian ini sumber data yang digunakan adalah:

a) Sumber data primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang memberikan data langsung dari tangan pertama diambil dari beberapa buku kepustakaan yang mengarah langsung pada pokok pembahasan penelitian ini. Adapun sumber data primer dalam penulisan penelitian ini meliputi buku Fiqh kontemporer dan buku-buku yang menunjang penelitian ini.

¹⁰ Masyuri dkk. Metodologi Penelitian (Bandung: Rafika Aditama, 2008), hlm.50.

¹¹ Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm.129.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan data pelengkap yang diperoleh lewat pihak lain atau mengutip dari pihak lain. Dengan kata lain data sekunder adalah data yang telah dahulu dikumpulkan dan dilaporkan orang walaupun data yang dikumpulkan itu sesungguhnya data asli. Data sekunder antara lain kitab-kitab, dokumen-dokumen, buku-buku, hasil penelitian terdahulu seperti penelitian, tesis, disertasi dan lain sebagainya yang menunjang serta dapat menguatkan sumber penelitian ini.¹² Termasuk data sekunder dalam penelitian ini adalah artikel-artikel atau catatan-catatan yang dapat menunjang terselesaikannya penelitian ini.

F. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data penelitian ini adalah dokumentasi. Metode dokumentasi ini digunakan untuk melacak data-data penelitian yang bersifat kepustakaan yang berupa dokumen tertulis dalam kitab-kitab fiqh dan berbagai sumber-sumber lain seperti buku-buku, jurnal, koran, artikel, dokumen undang-undang, situs website dan lain sebagainya.¹³

G. Teknik Analisis Data

Analisis artinya menguraikan suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh

¹² Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 30.

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 236.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.¹⁴ Untuk menganalisis data diperlukan suatu metode analisis yang tepat. Analisis data dari hasil pengumpulan data, merupakan tahapan yang penting dalam penyelesaian suatu kegiatan penelitian ilmiah.¹⁵

Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan oleh penulis adalah *metode content analysis*. Tahapan-tahapan analisis ini adalah pertama, mereduksi data dimana sebagai proses seleksi dan memfokuskan hak kewarisan anak dalam fiqih kontemporer. Kedua, displai data, dalam tahap ini penulis akan menghubungkan data satu dengan data yang lainnya (antara data sumber primer dan sumber sekunder).

Sehingga pada tahap ini akan menghasilkan data yang konkret dan memperjelas informasi agar lebih mudah dipahami oleh pembaca. Ketiga, peneliti mulai melakukan penafsiran terhadap data (analisis data) sehingga data yang telah terorganisasikan memiliki makna.¹⁶

Pada penulisan penelitian ini, analisis dilakukan dengan cara mendeskripsikan data-data untuk menjelaskan bagaimana hak kewarisan anak hasil *watha' syubhat*.

¹⁴ Ari Lukman, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi ke-2 (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 32.

¹⁵ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Refleksi Pengembangan Pemahaman Dan Penguasaan Metodologi penelitian*, cet, II (Malang: UIN Malik Press, 2010), hlm. 119.

¹⁶ Moch. Soehadha, *Metodologi Sosiologi Agama* (Yogyakarta: Teras, 2008), hlm. 114-115.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan penulis dan mendapatkan gambaran yang utuh dan terpadu mengenai kajian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan. Bab ini mencakup latar belakang masalah. Masalah untuk memberikan penjelasan mengapa penulisan ini perlu dilakukan. Apa yang melatar belakangi penelitian ini. Rumusan masalah dimaksudkan untuk mempertegas pokok-pokok masalah yang akan diteliti agar lebih terfokus. Kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian untuk menjelaskan tujuan dan urgensi penelitian ini. Untuk selanjutnya tentang metode penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data. Adapun metodologi dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana cara yang akan dilakukan penulis dalam penelitian ini, pendekatan apa yang dipakai dan bagaimana langkah-langkah penelitian tersebut akan dilakukan. Terakhir adalah sistematika pembahasan.

BAB II : Berisi tinjauan umum tentang pertalian nasab dan kewarisan, yang mencakup pengertian kewarisan, yang berhak menerima waris, unsur-unsur hukum waris, syarat-syarat mewarisi sebab-sebab orang mewarisi, faktor penghalang kewarisan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB III : Membahas tentang tinjauan umum tentang anak, pengertian anak dalam hukum islam, pengertian anak luar kawin menurut hukum islam mencakup anak sah, dan anak yang tidak sah.

BAB IV : Mengupas seputar hak kewarisan yang dimiliki anak *watha' syubahat* perfektif fiqih kontemporer, implikasi *watha' syubahat* terhadap kewarisan

BAB V : Mencakup kesimpulan sekaligus saran-saran berkaitan dengan hasil penelitian yang ditemukan oleh penyusun sekaligus diajukan sebagai jawaban atas pokok masalah. Pada bagian akhir dari skripsi ini juga memuat hal-hal penting dan relevan dengan penelitian yang tidak perlu dimuat pada bagian utama, terdiri atas daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

HUBUNGAN KEWARISAN MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian dan Sumber Hukum

Dalam kamus bahasa Indonesia hubungan adalah ikatan atau pertalian¹⁷. Jika dihubungkan dengan kewarisan berarti adanya hubungan kewarisan merupakan sebab beralihnya harta seorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup yang memiliki hubungan dengan orang yang telah meninggal tersebut.

Kewarisan berfungsi untuk menggantikan kedudukan pewaris dalam memiliki dan memanfaatkan harta miliknya. Kebijakan hukum syara' bahwa penggantian itu dipercayakan kepada orang-orang yang banyak memberi bantuan, pertolongan dan pelayanan dalam rumah tangga memelihara harta demi pendidikan putra-putrinya seperti suami istri. Dan juga dipercayakan kepada orang-orang yang selalu menjunjung tinggi martabat dan nama baiknya dan selalu berdoa sepinggalannya seperti anak turunannya.

Yang mempunyai hak untuk menerima harta warisan pewaris adalah orang-orang yang mempunyai sebab-sebab yang mengikatnya untuk menerima harta waris tersebut. Adanya hubungan kewarisan yang pertama dipengaruhi oleh hubungan darah, seorang anak lahir dari rahim seorang ibu yang melahirkannya itu Kemudian mencari hubungan dengan laki-laki yang menyebabkan ibunya melahirkan, maka hubungan darah berlaku pula antara

¹⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), cet. ke-2, hlm.508.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dia dan laki-laki itu yang disebut dengan ayah¹⁸. Sebab hubungan kewarisan yang kedua adalah karena pernikahan yang sah, dengan arti istri adalah ahli waris suami dan begitu sebaliknya. Dasar hukum adanya hubungan kewarisan dari ayat-ayat al-Quran antara lain: Surat an-Nisa' ayat 11 tentang adanya hubungan kewarisan yang disebabkan oleh hubungan kekerabatan:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya : “Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”¹⁹.

¹⁸ Hajar M, *Hukum Kewarisan Islam*, Riau: Suska Pers, 2014

¹⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, hlm.77.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kata *walad* menunjukkan sebab terjadinya peralihan harta yang dipengaruhi oleh hubungan darah antara ibu ayah dan anak. Kemudian ketentuan untuk memberikan hak masing-masing ahli waris laki-laki atau pun perempuan yang mendapatkan hak tertentu dari warisan ibu bapak dan kerabat yang di atur oleh Allah. Penggunaan kata *zakkar* pada ayat di atas bukan *rajulun* berarti untuk menegaskan bahwa usia tidak menjadi faktor penghalang bagi penerimaan harta warisan. Penetapan laki-laki menerima hak yang lebih besar dari perempuan karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan seperti kewajiban membayar mahar dan memberi nafkah²⁰.

Ayat di atas juga menjelaskan tentang bagian masing-masing ahli waris, menurut al-maraghi bagian yang telah ditetapkan kepada para ahli waris harus mengambilnya sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan oleh Allah.

Ayat ini menerangkan secara umum bahwa orang yang mempunyai hubungan darah menjadi sebab terjadinya hubungan kewarisan dalam agama Islam.

Surat an-Nisa ayat 12 tentang adanya hubungan kewarisan yang dipengaruhi oleh hubungan perkawinan :

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دِينَ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ

²⁰ Ahmad Mustafa al Maraghi, *Tafsir al Maraghi*, (Mesir : Mushthafa al Bab al Halaby, 1974), cet. ke-2, hlm. 345.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَإِن كَانَ
رَجُلٌ يُورِثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ
فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ
بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya : “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika Isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika Saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka 22 mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris) (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun”²¹.

Dalam ayat di atas digunakan kata *azwaj* yang secara etimologis berarti pasangan suami dan istri yang menunjukkan secara pasti hubungan kewarisan antara keduanya. Bila hubungan kewarisan berlaku antara yang mempunyai hubungan kekerabatan karena adanya hubungan alamiah antara keduanya, maka hubungan kewarisan antara suami dan istri disebabkan adanya hubungan hukum antara suami dan istri tersebut. Ayat di atas juga

²¹ Ibid, hlm.78.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjelaskan bagian masing-masing sesuai keadaan masing-masing suami istri.

Sumber adanya hubungan kewarisan dari hadist Rasulullah Saw antara lain :

عَنْ هَزْلِيلِ بْنِ شُرَحْبِيلٍ قَالَ: سَأَلَ أَبُو مُوسَى عَنِ ابْنِ وَ ابْنَةِ ابْنٍ وَ أُخْتٍ فَقَالَ :
لِلْإِبْنَةِ النِّصْفُ وَ لِلْأُخْتِ النِّصْفُ وَأْتِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَسَيِّئًا بَعْثِي فَسُئِلَ ابْنِ مَسْعُودٍ
وَأُخْبِرَ بِقَوْلِ أَبِي مُوسَى فَقَالَ : لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ أَقْضَى فِي هَذَا
بِمَا قَضَى النَّبِيُّ ص م لِلْإِبْنَةِ النِّصْفُ وَ لِلْأُخْتِ النِّصْفُ وَ لَا بَنَةَ ابْنِ السُّدُسِ تَكْمِلَةَ الْثُلُثَيْنِ (رَوَاهُ
الْبُخَارِيُّ)

Artinya : “Dari Huzail bin Surahbil berkata: Abu Musa ditanya tentang kasus kewarisan seorang anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki dan seorang saudara perempuan. Abu Musa berkata: “ untuk anak perempuan setengah, untuk saudara perempuan setengah. Datanglah kepada Ibnu Mas’ud, tentu ia akan berkata seperti itu pula. “ kemudien ditanyakan kepada Ibnu Mas’ud dan dia menjawab: “saya menetapkan berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW. Yaitu untuk perempuan setengah, untuk cucu perempuan seperenam, sebagai pelengkap dua pertiga sisanya untuk saudara perempuan” ²²(hadist riwayat Bukhari).

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ . أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ص م فَقَالَ : أَنَّ ابْنَ ابْنِي
مَاتَ فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثٍ فَقَالَ لَكَ السُّدُسُ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

Artinya : “Dari Imran bin Husein bahwa seorang laki-laki mendatangi nabi dan berkata: “bahwa anak dari anak laki-laki saya meninggal dunia, apa yang saya dapat dari harta warisannya. “Nabi berkata:” kamu mendapat seperenam” ²³(hadis riwayat Abu Daud).

B. Pengertian Hukum Waris

Hukum yang mengatur tentang peralihan harta warisan dari pewaris

kepada ahli waris dinamakan hukum kewarisan, yang dalam Hukum Islam

²² Al Bukhari, *Shahih al Bukhari*, (Cairo : Dar wa Mathba’ al Sya’biy, tt), Juz 4, cet. ke-1, hlm. 188 4.

²³ Abu Daud, *Sunanu Abi Dawud*, (Cairo : Mustafa al Babiy, 1952), juz 2, cet. ke-1, hlm. 53.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

dikenal dengan beberapa istilah seperti : *faraidl*, Fiqih Mawaris, dan lain-lain, yang kesemua pengertiannya oleh para *fuqaha* (ahli hukum fiqh) dikemukakan sebagai berikut :

1. Tgk. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, hukum kewarisan adalah Suatu ilmu yang dengan dialah dapat kita ketahui orang yang menerima pusaka, orang yang tidak menerima pusaka, serta kadar yang diterima tiap-tiap waris dan cara membaginya.²⁴
2. Abdullah Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, *Ilmu faraidl* ialah Ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah fikih dan ilmu hitung yang berkaitan dengan harta warisan dan orang-orang yang berhak yang mendapatkannya agar masing-masing orang yang berhak mendapatkan bagian harta warisan yang menjadi haknya.²⁵
3. Ahmad Zahari, Hukum kewarisan Islam yaitu hukum yang mengatur tentang peralihan hak milik atas harta warisan dari pewaris kepada orang-orang yang berhak menerimanya (ahli waris), barapa besar bagiannya masingmasing, kapan dan bagaimana cara peralihannya sesuai ketentuan dan petunjuk Al-Qur'an, hadist dan ijtihad para ahli.²⁶ Berdasarkan defisini-definisi di atas dapatlah dipahami bahwa hukum kewarisan (ilmu faraid) sebagai ilmu yang mengatur tentang pemindahan dan pembagian harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada orang-orang yang masih hidup, baik mengenai harta yang ditinggalkan, orang-

²⁴ Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 18.

²⁵ Abdullah Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim Sahih *Fikih Sunnah* (Penterjemah Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh), (Jakarta, Pustaka Azzam, 2007), hlm. 682.

²⁶ Ahmad Zahari, *Hukum Kewarisan Islam*, (Pontianak : FH Untan Press, 2008). Hlm. 27.

orang yang berhak menerimanya (ahli waris), bagian masing-masing ahli waris maupun cara penyelesaian pembagiannya.

Kompilasi Hukum Islam yang tertuang dalam format perundangundangan yang mengatur ketentuan kewarisan dipakai sebagai pedoman dalam hukum kewarisan Islam.

C. Unsur-Unsur Hukum Waris Menurut Islam

Menurut ketentuan Hukum Kewarisan Islam ada tiga unsur yaitu :

1. Pewaris (*Muwarit*), yaitu: Seseorang yang telah meninggal dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup.²⁷ Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf b mendefinisikan sebagai berikut :Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
2. Ahli Waris (*Warits*), yaitu : Orang yang berhak mendapat warisan karena mempunyai hubungan dengan pewaris, berupa hubungan kekerabatan, perkawinan atau hubungan lainnya.Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 171 huruf c, menyatakan ahli waris adalah: Orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

²⁷ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Melayu* (Mangkabau, (Jakarta : Gunung Agung, 1984), hlm. 51.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Warisan (*Mauruts*), yaitu : Sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, baik berupa benda bergerak maupun benda tak bergerak.

D. Syarat-Syarat Mewaris

Sebelum seseorang mewaris haruslah dipenuhi tiga syarat yaitu :

1. Meninggal dunianya pewaris

Meninggalnya pewaris mutlak harus dipenuhi karena seseorang baru disebut pewaris setelah dia meninggal dunia yang berarti jika seseorang memberikan hartanya kepada ahli waris ketika dia masih hidup itu bukan waris. Meninggal dunia atau mati dapat dibedakan :

- a. Mati *haqiqy* (sejati), adalah kematian yang dapat disaksikan oleh panca indra;
- b. Mati *hukmy* (menurut putusan hakim), yaitu kematian yang disebabkan adanya putusan hakim, baik orangnya masih hidup maupun sudah mati;
- c. Mati *taqdiry* (menurut dugaan), yaitu kematian yang didasarkan ada dugaan yang kuat bahwa orang yang bersangkutan telah mati.²⁸

2. Hidupnya ahli waris

Hidupnya ahli waris harus jelas pada saat pewaris meninggal dunia karena seseorang akan mewaris jika dia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia. Ahli waris merupakan pengganti untuk menguasai warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, perpindahan hak tersebut diperoleh melalui jalan kewarisan.

²⁸ H.R.Otje Salman S, Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: PT.Refika Aditama, 2006), hlm. 5.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Tidak ada penghalang-penghalang untuk mewaris.

Tidak terdapat salah satu dari sebab terhalangnya seseorang untuk menerima warisan.

E. Sebab-Sebab Orang Mewaris

Harta orang yang telah meninggal dunia dengan sendirinya berpindah kepada orang yang masih hidup yang mempunyai hubungan dengan orang yang meninggal tersebut. Hubungan yang dimaksud adalah yang menyebabkan orang menerima warisan, yaitu:

1. Hubungan Kekerabatan (*nasab*)

Salah satu sebab beralihnya harta seorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup adalah adanya hubungan silaturahmi atau kekerabatan antara keduanya, yaitu hubungan *nasab* yang disebabkan oleh kelahiran. Kekerabatan merupakan causalitas adanya seseorang yang tidak dapat dihilangkan, berbeda dengan perkawinan yang merupakan hal baru yang dapat dihilangkan²⁹.

Pada tahap awal anak mempunyai hubungan kekerabatan dengan ibu yang melahirkannya. Hal ini tidak dapat dibantah, karena anak tersebut keluar dari rahim ibu. Hubungan darah ini bersifat alamiah dan berlaku sejak awal adanya manusia. Dengan berlakunya hubungan kerabat antara seorang anak dengan ibunya, berlaku pula hubungan darah dari orang-orang yang lahir dari ibu yang sama. Artinya bahwa diantara sesama saudara seibu mempunyai hubungan darah, hal ini yang menyebabkan mereka saling berhubungan kewarisan³⁰. Selanjutnya hubungan

²⁹ Fathur Rahman, op.cit, hlm.116.

³⁰ Hajar M, *Hukum Kewarisan Islam*, Loc.Cit.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekerabatan juga berlaku antara seseorang yang lahir dengan laki-laki yang menyebabkan ia lahir yang disebut dengan ayah. Bila dapat dipastikan secara hukum bahwa laki-laki yang menikahi ibunya itu yang menyebabkan ibunya hamil dan melahirkan.

Hubungan kekerabatan ditegaskan Allah SWT dalam surat an-Nisa' ayat 11,12 dan surat al-Anfal ayat 75 yang ahli warisnya telah terinci dalam ayat tersebut.

Hubungan kekerabatan juga bisa terwujud disebabkan adanya kelahiran yang secara subhat. Subhat terbagi 2 subhat perbuatan dan subhat hukum, subhat perbuatan adalah hubungan kelamin yang terjadi antara seorang laki-laki dan perempuan dalam keadaan tertentu yang masing-masing mengira bahwa yang digaulinya adalah pasangan yang sah, sedangkan subhat hukum adalah hubungan kelamin yang terjadi karena aqad yang semula sah, tetapi kemudian itu tidak sah dinikahnya³¹. Seperti keduanya adalah dua orang yang bersaudara.

Hubungan kerabat bisa juga terjadi atas dasar pembuktian melalui pengakuan yaitu pengakuan seorang laki-laki bahwa seseorang anak adalah anaknya secara sah. Untuk sahnya pembuktian kekerabatan ini diperlukan beberapa persyaratan. pertama, ada orang yang hilang ada pula pihak keluarga yang kehilangan. Kedua, dari segi umur keduanya pantas berhubungan kerabat. Ketiga, sama-sama mengakui adanya hubungan kerabat³².

³¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. hlm.21.

³² Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Hubungan Perkawinan Hak saling mewaris antara suami istri yang disebabkan adanya hubungan hukum yaitu perkawinan. Berlakunya hubungan kewarisan antara suami isteri didasarkan pada:
 - a. Adanya akad nikah yang sah;
 - b. Keduanya masih terikat perkawinan ketika salah satumeninggal dunia, termasuk juga isteri yang dalam masa iddah setelah di talak *raji'i*.
3. Hubungan *Wala* Adalah hubungan antara seorang hamba dengan orang yang memerdekakannya, orang yang memerdekakan hamba dapat mewarisi harta hamba yang dimerdekakannya, berdasarkan ketentuan Rasul (Hadis).
4. Hubungan Seagama Hak saling mewaris sesama umat Islam yang pelaksanaannya melalui Baitulmaal. Hubungan ini terjadi apabila seorang Islam meninggal dunia tidak mempunyai ahli waris, sehingga hartanya diserahkan ke Baitulmaal untuk digunakan oleh umat Islam.

F. Faktor Penghalang Kewarisan

1. Pengertian penghalang kewarisan

Penghalang merupakan bahasa arab dari *al-manii'* bentuk tunggal dari *al-mawanii'* menurut bahasa adalah penghalang, sedangkan menurut istilah sesuatu yang menyebabkan status seseorang menjadi penghalang karena adanya penyebab³³. Amien Nasution dalam bukunya mendefenisikan penghalang sebagai keadaan atau sifat yang menyebabkan seseorang tidak dapat menerima harta warisan, padahal sudah cukup syarat

³³ Wahbah al Zuhaili, *Fiqh al Islam wa Adillatuhu*, penerjemah Abdul Hayyi al-Katani, (Jakarta : Gema Insani, 2011) Jilid 10, cet. ke-1, hlm.351.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan sebab untuk menerima harta warisan³⁴. Sedangkan Amir Syarifuddin mendefinisikan penghalang dengan sesuatu yang adanya hal itu menyebabkan tidak adanya hukum³⁵.

Penghalang kewarisan menjadi suatu permasalahan yang sangat penting karena hal ini terjadi banyak perbedaan mengenai apa dan bagaimana penghalang kewarisan tersebut. Pada awalnya seseorang berhak untuk menerima harta warisan, tetapi karena ada suatu keadaan menyebabkan dia tidak mendapatkan harta warisan.

Ulama banyak berbeda pendapat mengenai permasalahan penghalang kewarisan. Seperti kalangan Hanafiyah membaginya kepada empat pembagian, yakni: perbudakan, pembunuhan, berbeda agama dan berlainan Negara. Kalangan Syafiiyah dan Hanabilah membaginya dalam tiga pembagian, yakni: perbudakan, pembunuhan dan berbeda agama. Sedangkan kalangan Malikiyah membaginya kepada sepuluh pembagian, yakni: berbeda agama, budak, pembunuhan sengaja, *li'an*, zina, ragu matinya pewaris, hamil, ragu hidupnya anak yang akan dilahirkan³⁶. Penghalang mewarisi yang disepakati ulama fiqih ada tiga³⁷:

a. Perbudakan

Menurut bahasa berarti pengabdian, sedangkan istilah adalah ketidak mampuan secara hukum yang menetap pada diri manusia³⁸.

Al-Qur'an telah menggambarkan bahwa seorang budak tidak cakap

³⁴ Amien Husain Nasution, *Hukum Kewarisan analisis Komperatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2012), cet. ke-1, hlm.78.

³⁵ Amir Syarifuddin, op.cit, hlm.39.

³⁶ Wahbah al Zuhaili, loc.cit.

³⁷ Ibid, hlm. 3540.

³⁸ Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengurusi hak milik kebendaannya dengan jalan apa saja, berdasarkan firman Allah SWT dalam surat an-Nahl : 75.

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّْا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا ۖ هَلْ يَسْتَوُونَ ۚ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾

Artinya: "Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yangdimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang kami beri rezki yang baik dari kami, lalu dia menafkahkan sebagian dari rezki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, Adakah mereka itu sama? segala puji Hanya bagiAllah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui"³⁹.

Status hamba sahaya merupakan penghalang untuk menerima harta warisan, karena Allah mencantumkan orang yang berhak menerima warisan dengan huruf lam lit tamlik yang menunjukkan hak kepemilikan, yang berarti harta tersebut menjadi hak tuannya. Sementara hamba sahaya tidak memiliki hak kepemilikan.

Terhalangnya seorang budak waris-mewarisi ditinjau dari 2 segi:

1. Mewarisi harta dari ahli warisnya, disebabkan karena ia dipandang tidak cakap mengurus harta milik, apabila harta diberikan kepadanya, maka secara yuridis harta tersebut secara otomatis akan menjadi milik tuannya. Status keluarganya dengan kaum kerabatnya sudah putus karena ia sudah menjadi keluarga asing⁴⁰.

³⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, op.cit, hlm.275.

⁴⁰ Fathur Rahman , op.cit, hlm.84.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Mewariskan harta kepada pewarisnya, Seorang budak tidak dapat mewariskan harta miliknya karena ia adalah milik tuannya dan tidak cakap bertindak terhadap sesuatupun.

Namun Pada masa sekarang permasalahan perbudakan ini tidaklah menjadi sesuatu yang penting untuk dibahas, karena masalah perbudakan sudah tidak ada dan dilarang di seluruh dunia praktiknya. Hal ini dicantumkan hanya sebagaisebuah pelengkap dalam mengetahui hukum mengenai masalah penghalang kewarisan.

b. Pembunuhan

Pembunuhan adalah salah satu penghalang waris, pembunuhan yang dimaksud disini adalah pembunuhan yang dilakukan kepada keluarga dengan motif untuk memudahkan atau mempercepat bagi pihak yang membunuh untuk mendapatkan warisan. Dalam hukum Islam pembunuhan adalah dosa yang dikategorikan sangat besar hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Isra' ayat 33:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿١٦﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya kami Telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan”⁴¹.

Dan juga terbukti dengan hukuman yang diterapkan kepada para pembunuh sangat berat seperti *diyat* dan *qishash*. Ulama ahli

⁴¹ Departemen Agama Republik Indonesia, op.cit, hlm.285.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

waris sepakat bahwa pembunuhan adalah salah satu penghalang waris hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah :

حد ثنا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحًا. أَنَّ أَبَانَ اللَّيْثُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ, عَنْ بَنِي شِهَابٍ, عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَّهَ)

Artinya: "Muhammad Bin Rumhin bercerita kepada kami. Anak lakilaki al-Laist Bin Said dari Ishak Bin Abi Parwah, dari Ibni Sihab, dari Humaid Bin Abdirrahman Bin Auf, diterima dari Abu Hurairah Ra, bahwa Rasulullah Saw berkata" orang yang membunuh tidak dapat mewarisi"⁴². (HR. Ibnu Majjah).

Hadis di atas cukup kuat sehingga dapat diterima dan ditempatkan sebagai dalil yang dapat dijadikan hujjah. Namun mereka tidak sependapat mengenai jenis-jenis pembunuhan yang bisa menghalangi waris karena peraturan mengenai pembunuhan cukup banyak sehingga perlu pembahasan tersendiri mengenai hal ini.

Ketentuan ini mengandung kemaslahatan agar orang tidak mengambil jalan pintas untuk mendapatkan harta warisan dengan membunuh orang yang mewariskan⁴³.

Pada dasarnya pembunuhan adalah suatu kejahatan yang dilarang oleh agama, tapi dalam beberapa keadaan pembunuhan bukan suatu kejahatan yang membuat pelakunya berdosa. Yang dikelompokkan kepada 2 macam :

⁴² Abi Abdullah Muhammad Bin Yazid, *Sunan Ibnu Majjah*, (Bairut Libanon: Dar al Fikr, tt), Juz 2, cet. ke-2, hlm.113.

⁴³ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan; Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Muftahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm.78.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pembunuhan secara hak dan tidak melawan hukum, yaitu pembunuhan yang pelakunya tidak dinyatakan pelaku kejahatan atau dosa. Seperti pembunuhan terhadap musuh dalam perang, pembunuhan dalam pelaksanaan hukuman mati dan pembunuhan dalam membela jiwa dan harta.
2. Pembunuhan secara tidak hak dan melawan hukum, Yaitu pembunuhan yang dilarang agama dan pelakunya dikenakan sanksi dunia atau akhirat. Seperti pembunuhan yang dilakukan secara sengaja dan terencana, pembunuhan tersalah, seperti sengaja dan pembunuhan seperti tersalah.

Bentuk pembunuhan yang menjadi penghalang hak kewarisan terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama: Fukaha' aliran Syafiiyah dengan berpegang kepada keumuman hadist di atas berpendapat bahwa segala bentuk tindakan pembunuhan yang dilakukan ahli waris kepada pewarisnya adalah menjadi salah satu faktor terhalangnya mewarisi. Menurut ulama Hanafiyah pembunuhan yang menghalangi menerima warisan terbagi dua :

1. Pembunuhan yang bersanksi *qishas*
2. Pembunuhan yang bersanksi *kifarah*⁴⁴

Pembunuhan yang bersanksi *qishas* adalah pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dengan menggunakan alat-alat yang dapat

⁴⁴ Fathur Rahman, op.cit, hlm.86.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mematikan⁴⁵. Berdasarkan dalil al-Quran dalam surat al-baqoroh 178 dan an-Nisa' ayat 93:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحَرُّ بِالْحَرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۚ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih"⁴⁶.

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿١٧٩﴾

Artinya: "Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya"⁴⁷.

Pembunuhan yang bersanksi *kafarah* adalah pembunuhan yang dituntut sebagai sanksi kelalaiannya dengan membebaskan budak Islam atau puasa dua bulan berturut-turut. Adapun pembunuhan ini dibagi pada tiga macam:

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, op.cit, hlm.27.

⁴⁷ Ibid., hlm. 93.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Serupa atau mirib sengaja (*syibhul amdi*) misalnya sengaja melakukan penganiayaan dengan pukulan tanpa niat membunuhnya, tetapi ternyata ia meninggal dunia
2. Pembunuhan karena khilaf (*qathul khata'i*) misalnya seorang yang sedang latihan menembak tepat pada sasaran pohon, tetapi meleset mengenai orang lain yang berda didekatnya.
3. Yang dianggap khilaf, misalnya orang yang sedang membawa benda berat tanpa sengaja mengenai saudaranya hingga mati⁴⁸. Sifat pembunuhan ini dan sanksi kafarahnya ditentukan oleh Allah dalam al-Quran dalam surat an-Nisa': 92

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُسْلَمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَّةٌ مُسْلَمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٩٢﴾

Artinya: "Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali Karena tersalah (Tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin Karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah]. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai)

⁴⁸ Muhibbin, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), cet. ke-1, hlm.78.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah sipembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (siterbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. barangsiapa yang tidak memperolehnya. Maka hendaklah ia (sipembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan Taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”⁴⁹

Menurut ulama Hanabilah pembunuhan yang menjadi penghalang untuk mewarisi adalah: segala pembunuhan yang dilakukan tidak dengan hak, sedangkan pembunuhan yang dilakukan secara hak tidak menghalangi untuk menerima harta warisan.

Terhalangnya seorang pembunuh untuk menerima harta warisan dipengaruhi oleh beberapa alasan:

1. Pembunuhan itu memutuskan hubungan silaturahmi yang merupakan salah satu penyebab adanya hubungan kewarisan. Dengan terputusnya sebab maka terputuslah *musabbab* atau hukum yang menetapkan hak kewarisan
2. Untuk mencegah seseorang yang telah ditentukan akan menerima warisan untuk mempercepat proses berlakunya hak itu.
3. Pembunuhan adalah suatu kejahatan atau maksiat, sedangkan hak kewarisan adalah suatu nikmat, dan maksiat tidak boleh digunakan untuk mendapatkan nikmat⁵⁰.
4. Berbeda agama

Berbeda agama adalah adanya perbedaan agama yang menjadi kepercayaan antara orang yang mewarisi dengan orang yang

⁴⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, op.cit , hlm.93.

⁵⁰ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta :Gunung Agung.1984), cet. ke-1, hlm. 196.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mewariskan⁵¹. Al-Quran memang tidak menyebutkan keseragaman agama ahli waris dengan pewaris dalam hak ahli waris tersebut memperoleh bagian yang ditentukan, dasar hukumnya adalah hadist Nabi Saw:

حد ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْإِسْرَاقِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عُيَيْنَةَ عَنِ الرَّهْزِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَسَا مَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَى هُنَّ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (متفق عليه)

Artinya: "Orang Islam tidak dapat mewarisi harta orang kafir, dan orang kafirpun tidak dapat mewarisi harta orang Islam.(hadis riwayat Bukhari dan Muslim")⁵².

Jumhur ulama sepakat bahwa nonmuslim tidak dapat mewarisi harta orang Islam, hal ini dijelaskan dalam al-Quran surah an-Nisa' ayat 141:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بِكُفْرٍ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْذِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعَكُمْ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ۚ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۖ وَلَنُجْزِلَنَّ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Artinya : "(yaitu) orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu. Apabila kamu mendapat kemenangan dari Allah mereka berkata, "Bukankah kami (turut berperang) bersama kamu?" Dan jika orang kafir

⁵¹ Muhibbin, Abdul Wahid, op.cit, hlm.78.

⁵² Imam al Bukhari, *Sahih al Bukhari*, (Tt: Dar al Fikr, 1981 M \ 1401 H), Juz 7, cet. ke-1, 111 Lihat juga Imam Muslim, *Sahih Muslim*, (Bairut Libanon : Dar al Kutub al Ilmiyah, 1971), cet. ke-1, hlm.627.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*mendapat bagian, mereka berkata, “Bukankah kami turut memenangkanmu, dan membela kamu dari orang mukmin?” Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu pada hari Kiamat. Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman.”*⁵³

Semua mujtahid sepakat bahwa non muslim tidak dapat jadi ahli waris dari pewaris muslim. Dalam hal orang muslim mewarisi dari yang bukan muslim terdapat perbedaan pendapat⁷⁴. Pendapat ini dianut oleh Umar, Muaz dan Muawwiyah juga diikuti oleh aliran Syiah.

⁵³ Departemen Agama Republik Indonesia, Op.Cit , h.101.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK

A. Pengertian Anak Menurut Hukum Islam

Secara umum menurut para ahli, dikatakan bahwa anak adalah anugerah dari tuhan yang maha kuasa yang harus dijaga, dididik sebagai bekal sumber daya, anak merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya. Seorang anak hadir sebagai amanah dari Tuhan untuk dirawat, dijaga dan dididik yang kelak setiap orang tua akan diminta pertanggungjawaban atas sifat dan perilaku anak semasa didunia. Secara harfiah anak adalah seorang cikal bakal yang kelak akan meneruskan generasi keluarga, bangsa dan negara. Anak juga merupakan sebuah aset sumber daya manusia yang kelak dapat membantu membangun bangsa dan negara.⁵⁴

Dalam literatur lain dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak, Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Masa depan bangsa dan negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang, Semakin baik kepribadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, Apabila kepribadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan

⁵⁴ www.idjoel.com/penegrtian-anak-menurut-para-ahli/

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bangsa yang akan datang. Pada umumnya orang berpendapat bahwa masa kanak-kanak merupakan masa yang panjang dalam rentang kehidupan.⁵⁵

Pengertian anak baik secara umum maupun pendapat para ahli, ketika anak beranjak dewasa, dan orang tua tidak mampu maka anak merupakan harapan orang tua untuk bertumpu. Namun pada perkembangan zaman yang semakin canggih, pergaulan anak juga harus diperhatikan secara seksama. Pergaulan anak serta kepada siapa anak berteman yang mana dapat mempengaruhi hidup dan perjalanan hidupnya kelak saat dewasa.

Dalam pemaknaan yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam bidang ilmu pengetahuan (*the body of knowledge*) tetapi dapat di telaah dari sisi pandang sentralistis kehidupan. Misalnya agama, hukum dan sosiologi menjadikan pengertian anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial. Disertai dengan ketentuan hukum atau persamaan kedudukan dalam hukum (*equality before the law*) dapat memberikan legalitas formal terhadap anak sebagai seorang yang tidak mampu untuk berbuat peristiwa hukum yang ditentukan oleh ketentuan peraturan-peraturan hukum itu sendiri, atau meletakkan ketentuan hukum yang memuat perincian tentang klasifikasi kemampuan dan kewenangan berbuat peristiwa hukum dari anak yang bersangkutan. Hak-hak privilege yang diberikan negara atau pemerintah yang timbul dari UUD dan peraturan perundang-undangan.⁵⁶

Untuk dapat memahami pengertian tentang anak itu sendiri dalam perspektif hukum Islam sehingga mendekati makna yang benar, diperlukan

⁵⁵ D.Y. Witanto, *Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Kencana, Jakarta: 2012, hlm. 59.

⁵⁶ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Penerbit Al-Ma'arif Bandung, 1981.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu pengelompokan yang dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek agama, dan hukum.

a. Pengertian Anak Dari Aspek Agama Dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya dalam hal ini adalah agama Islam, anak merupakan makhluk yang lemah namun mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama Islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti dioberi nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang.

Dalam pengertian Islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lil'alamin dan sebagai pewaris ajaran Islam pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh orang tua, masyarakat, bangsa dan negara.⁵⁷

b. Pengertian Anak Dari Aspek Hukum Dalam hukum kita terdapat pluralisme mengenai pengertian anak, hal ini adalah sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tersendiri mengenai peraturan anak itu sendiri. Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian anak dari pandangan system hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai subyek hukum.

⁵⁷ Amir Syarifuddin, Op. Cit, hlm. 44.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Pengertian Anak Berdasarkan UUD 1945 Pengertian anak dalam UUD 1945 terdapat di dalam pasal 34 yang berbunyi: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara” hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak.⁵⁸ Dengan kata lain, anak tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Terhadap pengertian anak menurut UUD 1945 ini, Irma Setyowati Soemitri, SH. Menjabarkan sebagai berikut. “ketentuan UUD 1945, ditegaskan pengaturannya dengan dikeluarkannya UU No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, yang berarti makna anak (pengertian tentang anak) yaitu seseorang yang harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rahasia, jasmaniah, maupun sosial. Anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial. Anak juga berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah ia dilahirkan “.

d. Pengertian anak berdasarkan UU Peradilan Anak Anak dalam UU No.3 tahun 1997 tercantum dalam pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: “ Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun (deklapan belas) tahun dan belum pernah menikah.⁵⁹ ” Jadi dalam hal ini pengertian anak dibatasi

⁵⁸ Departemen Agama RI, UUD 1945, pasal 34.

⁵⁹ UU No.3 tahun 1997, *Tentang Peradilan Anak*, Tercantum Dalam Pasal 1 ayat (2).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan syarat sebagai berikut: pertama, anak dibatasi dengan umur antara 8 (delapan) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan syarat kedua si anak belum pernah kawin. Maksudnya tidak sedang terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila si anak sedang terikat dalam perkawinan atau perkawinanya putus karena perceraian, maka si anak dianggap sudah dewasa walaupun umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun.

e. Pengertian Anak Menurut UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 UU No.1 1974 tidak mengatur secara langsung tolak ukur kapan seseorang digolongkan sebagai anak, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam pasal 6 ayat (2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21 tahun mendapat izin kedua orang tua. Pasal 7 ayat (1) UU memuat batasan minimum usia untuk dapat kawin bagi pria adalah 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun. Menurut Prof. H. Hilman Hadikusuma.SH, menarik batas antara belum dewasa dan sudah dewasa sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan, hal ini dikarenakan pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang dan sebagainya walaupun ia belum kawin.

Dalam pasal 47 ayat (1) dikatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melakukan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaan orang tuanya. Pasal 50 ayat (1) menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berada di bawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali. Dari pasal-pasal tersebut di atas maka dapatlah disimpulkan bahwa anak dalam UU No1 tahun 1974 adalah mereka yang belum dewasa dan sudah dewasa yaitu 16 (enam belas) tahun untuk perempuan dan 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki.

f. Pengertian Anak Menurut Hukum Perdata Pengertian anak menurut hukum perdata dibangun dari beberapa aspek keperdataan yang ada pada anak sebagai seseorang subjek hukum yang tidak mampu. Aspek-aspek tersebut adalah: Status belum dewasa (batas usia) sebagai subjek hukum. Hak-hak anak di dalam hukum perdata. Pasal 330 KUHPerduta memberikan pengertian anak adalah orang yang belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai subjek hukum atau layaknya subjek hukum nasional yang ditentukan oleh perundang-undangan perdata.⁶⁰ Dalam ketentuan hukum perdata anak mempunyai kedudukan sangat luas dan mempunyai peranan yang amat penting, terutama dalam hal memberikan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anak, misalnya dalam masalah dala masalah pembagian harta warisan, sehingga anak yang berada dalam kandungan seseorang dianggap telah dilahirkan bilamana kepentingan si anak menghendaki sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 KUHPerduta.

B. Pengertian Anak Luar Kawin Menurut Islam

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah

⁶⁰ Departemen Agama RI, Op. Cit, Pasal 330.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

dengan pria yang menyetubuhinya. Sedangkan pengertian diluar kawin adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan, sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang dipeluknya.⁶¹

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan diatas, dapat dipahami bahwa anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah menurut *syara'*. Para ulama telah sepakat bahwa seorang tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya Sebagai anak sah, kalau anak itu dilahirkan kurang dari waktu enam bulan setelah akad perkawinan, sebab menurut mereka tenggang waktu yang sependek-pendeknya yang harus ada antara kelahiran anak dengan perkawinan itu adalah enam bulan. Ini berarti jika ada anak yang lahir tidak mencapai enam bulan setelah orang tuanya akad nikah, maka anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya sebagai anak yang sah.⁶²

Menurut H. Herusko banyak faktor penyebab terjadinya anak luar kawin, diantaranya adalah :⁶³ Anak yang dilahirkan oleh seorang wanita, tetapi wanita tersebut tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria yang menyetubuhinya dan tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria atau wanita lain;

- a. Anak yang dilahirkan dari seorang wanita, kelahiran tersebut diketahui dan dikehendaki oleh salah satu atau ibu bapaknya, hanya saja salah satu atau kedua orang tuanya itu masih terikat dengan perkawinan yang lain;

⁶¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 80.

⁶² Muhammad Yusuf Ishaq, *Pernikahan Wanita Hamil karena Zina menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Banda Aceh : IAIN Jami'ah Ar-Raniry, 1983), hlm. 88.

⁶³ H. Herusko, *Anak di Luar Perkawinan*, Makalah pada Seminar Kowani, Jakarta, 1996, hlm. 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- b. Anak yang lahir dari seorang wanita, tetapi pria yang menghamilinya itu tidak diketahui, misalnya akibat korban perkosaan.
- c. Anak yang lahir dari seorang wanita dalam masa *iddah* perceraian, tetapi anak yang dilahirkan itu merupakan hasil hubungan dengan pria yang bukan suaminya. Ada kemungkinan anak diluar kawin ini dapat diterima oleh keluarga kedua belah pihak secara wajar jika wanita yang melahirkan itu kawin dengan pria yang menyetubuhinya.
- d. Anak yang lahir dari seorang wanita yang ditinggal suami lebih dari 300 hari, anak tersebut tidak diakui suaminya sebagai anak yang sah.
- e. Anak yang lahir dari seorang wanita, padahal agama yang mereka peluk menentukan lain, misalnya dalam agama Katolik tidak mengenal cerai hidup, tetapi dilakukan juga, kemudian ia kawin lagi dan melahirkan anak. Anak tersebut dianggap anak luar kawin.
- f. Anak yang lahir dari seorang wanita, sedangkan pada mereka berlaku ketentuan Negara melarang mengadakan perkawinan, misalnya Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) tidak mendapat izin dari Kedutaan Besar untuk mengadakan perkawinan, karena salah satu dari mereka telah mempunyai istri, tetapi mereka tetap campur dan melahirkan anak tersebut, anak ini dinamakan juga anak luarkawin.
- g. Anak yang dilahirkan oleh seorang wanita, tetapi anak tersebut sama sekali tidak mengetahui kedua orang tuanya.
- h. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat di Kantor Catatan Sipil dan/atau Kantor Urusan Agama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

1. Anak yang lahir dari perkawinan secara adat, tidak dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya serta tidak didaftar di Kantor Catatan Sipil dan Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Dalam hukum Islam, melakukan hubungan seksual antara pria dan wanita tanpa ikatan perkawinan yang sah disebut zina. Hubungan seksual tersebut tidak dibedakan apakah pelakunya gadis, bersuami atau janda, beristri atau duda sebagaimana yang berlaku pada hukum perdata.

Ialah Ibnu Rusyd mengemukakan pengertian zina sebagai berikut :

“Zina persetubuhan yang terjadi diluar nikah yang sah, bukan *syubhat* nikah dan bukan milik.”⁶⁴

Ada dua macam yang digunakan bagi zina, yaitu :

- a. Zina *muhson*, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang telah atau pernah nikah.
- b. Zina *ghairu muhson*, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah, mereka berstatus perjaka atau perawan.

Hukum Islam tidak menganggap bahwa zina *ghairu muhson* sebagai perbuatan biasa, melainkan tetap dianggap Sebagai perbuatan zina yang harus dikenakan hukuman. Hanya saja hukuman itu kuantitasnya berbeda, bagi pezina *muhson* dirajam sampai mati sedangkan yang *ghairu muhson* dicambuk sebanyak 100 kali. Anak yang dilahirkan sebagai akibat zina *ghairu muhson* disebut anak luar kawin.⁶⁵ Allah berfirman dalam Q.S. AnNuur ayat 2, yang

⁶⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Juzu' II*, Mathba'ah al-Baby Al-Halaby, Kairo, 1950, hlm. 433.

⁶⁵ Abdul Manan, *Aneka Masalah hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 82.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِيَ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٧﴾

Artinya : “Perempuan dan laki-laki yang berzina, deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratuskali dera dan janganlah kamu merasa sayang terhadap keduanya dalam menjalankan agama Allah apabila kamu sungguh-sungguh beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dan hendaklah dipersaksikan hukuman keduanya oleh segolongan diantara orang-orang mukmin”.

Disamping hal diatas, hukum Islam juga menetapkan anak luar kawin adalah⁶⁶

- a. Anak *mula'nah*, yaitu anak yang dilahirkan dari seorang wanita yang dili'an suaminya. Kedudukan anak *mula'nah* ini hukumnya sama saja dengan anak zina, ia tidak mengikuti nasab suami ibunya yang *me-li'an*, tetapi mengikuti nasab ibu yang melahirkannya, ketentuan ini berlaku juga terhadap hukum kewarisan, perkawinan, dan lain-lain.
- b. Anak *syubhat*, kedudukannya tidak ada hubungan nasab dengan laki-laki yang menggauli ibunya, kecuali kalau laki-laki itu mengakuinya.

Dalam kitab Al-Ahwal al Syakhshiyyah karangan Muhyidin sebagaimana dikutip Muhammad Jawad Mughniyah ditemukan : ⁶⁷“Bahwa nasab tidak dapat ditetapkan dengan syubhat macam apapun, kecuali orang yang *syubhat* itu mengakuinya, karena sebenarnya ia lebih mengetahui tentang dirinya.” Tentang hal terakhir ini disepakati oleh para ahli hukum

⁶⁶ Ibid, hlm. 83.

⁶⁷ Muhammad Jawad Mugniyah, *Al-Fiqhu Madzahibil al-Khamasah*, terjemahan Afif Muhammad, (Jakarta : Basrie Press, 1994), hlm. 106.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dikalangan sunny dan syi'ah.” Hukum Islam membedakan *syubhat* kepada dua bentuk, yaitu :

- a. Anak *syubhat* yang dilahirkan dari *syubhat* perbuatan, adalah hubungan seksual yang dilakukan karena suatu kesalahan, misalnya salah kamar, suami menyangka yang tidur di kamar A adalah istrinya, ternyata adalah iparnya atau wanita lain. Demikian pula istrinya menyangka yang datang kekamarnya adalah suaminya, kemudian terjadilah hubungan seksual dan menyebabkan hamil serta melahirkan anak luar kawin.
- b. Anak *syubhat* hukum, yaitu anak yang dilahirkan dari suatu akad, misalnya seorang laki-laki menikahi seorang wanita, kemudian diketahui wanita yang dinikahi tersebut adalah adik kandungnya sendiri atau saudara sepersusuan yang haram dinikahi. Dalam *syubhat* hukum, setelah diketahui adanya kekeliruan itu, maka isterinya haruslah diceraikan, karena merupakan wanita yang haram dinikahi dalam Islam,⁶⁸ maka, pabila keduanya tidak mengetahui *fasid* (rusak) dan batilnya akad keduanya, maka keduanya tidak berdosa dan tidak dikenakan hukuman dan anak dinasabkan kepada bapaknya seperti pernikahan yang sah meskipun keduanya langsung dipisahkan karena *fasidnya* akad keduanya. Sedangkan apabila mereka telah mengetahui tentang *fasid* dan batilnya akad tersebut, maka tidak syak lagi tentang dosanya dan wajib bagi mereka dikenakan hukuman kemudian anak tidak dinasabkan kepada bapaknya.⁶⁹ Oleh karena masalah *syubhat* ini sesuatu yang diragukan

⁶⁸ Abdul Manan, Op Cit, hlm.84.

⁶⁹ Abdul Hakim bin Amir Abdat, www.almanhaj.or.id, diakses pada tanggal 20 Pebruari



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

keadaannya (ada kesamaran antara yang hak dan batil), maka perlu syubhat ini tidak dikenakan sanksi had (yaitu pukul 100 kali bagi yang belum kawin sebelumnya atau rajam bagi yang telah kawin) apabila syubhat betul-betul terjadi dengan tidak dengan sengaja, sama sekali tidak direkayasa.⁷⁰

C. Kedudukan Anak Menurut Hukum Islam

Di dalam Al-Qur'an, anak dapat sering disebutkan dengan kata *walad-awlad* yang berarti anak yang dilahirkan orang tuanya, laki-laki maupun perempuan, besar atau kecil, tunggal maupun banyak, karenanya jika anak belum lahir belum dapat disebut *al-walad* atau *al-mawlud*, tetapi disebut al-janin yang berarti *al-mastur* yang artinya tertutup dan *al-khafy* yang artinya tersembunyi didalam rahim ibu.⁷¹ Kata *al-walad* dipakai untuk menggambarkan adanya hubungan keturunan, sehingga kata *al-walad* dan *al-walidah* diartikan sebagai ayah dan ibu kandung. Berbeda dengan kata *ibn* yang tidak mesti menunjukkan hubungan keturunan dan kata *ab* tidak mesti berarti ayah kandung.⁷² Selain itu, Al-Qur'an juga menggunakan istilah *thifl* yang artinya kanak-kanak dan *ghulam* yang artinya muda remaja kepada anak, yang menyiratkan fase perkembangan anak yang perlu dicermati dan diwaspadai orang tua, jikaada gejala kurang baik dapat diberikan terapi

⁷⁰ Ibid, hlm.84.

⁷¹ Lois Ma'luf, *al-Munjid*, (Beirut, al-Mathba'ah al-Katsolikiyyah, t.th), hlm. 1019 dan

99.

⁷² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta : PT. Lentera Hati, 2004), hlm. 614.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sebelum terlambat, apalagi fase ghulam berarti remaja dimana anak mengalami puber, krisis identitas dan transisi menuju dewasa.

Al-Qur'an juga menggunakan istilah *ibn* pada anak, masih seakar dengan kata *bana* yang berarti membangun atau berbuat baik, secara semantis anak ibarat sebuah bangunan yang harus diberi pondasi yang kokoh, orang tua harus memberikan pondasi keimanan, akhlak dan ilmu sejak kecil, agar anak tumbuh dan berkembang menjadi anak yang memiliki prinsip dan kepribadian yang teguh. Kata *ibn* juga sering digunakan dalam bentuk *tashghir* sehingga berubah menjadi *bunayy* yang menunjukkan anak secara fisik masih kecil dan menunjukkan adanya hubungan kedekatan *al-iqtirab*. Panggilan *ya bunayya* yang artinya "wahai anakku" menyiratkan anak yang dipanggil masih kecil dan hubungan kedekatan dan kasih sayang antara orang tua dengan anaknya. Begitulah mestinya hubungan orang tua dengan anak, hubungan yang dibangun dalam pondasi yang mengutamakan kedekatan, kasih sayang dan kelembutan. Dalam Islam, anak adalah anak yang dilahirkan. Anak tercipta melalui ciptaan Allah SWT dalam perkawinan seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan kelahiran. Seorang anak yang sah adalah anak yang dianggap lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya. Dan sahnya seorang anak di dalam Islam adalah menentukan ada atau tidaknya hubungan kebakapan (*nasab*) dengan seorang laki-laki. Dalam hal hubungan nasab dengan bapaknya tidak ditentukan oleh kehendak atau kerelaan manusia, namun ditentukan oleh perkawinan yang dengan nama Allah SWT disucikan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Dalam hukum Islam ada ketentuan batasan kelahirannya yaitu batasan minimal kelahiran anak dari perkawinan ibunya adalah 6 (enam) bulan.

Berdasarkan dalam Al-Qur'an surat Al-Ahqaaf ayat (15) yang

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَحَمْلُهُ ۖ
وَفَصْلُهُ ۖ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ ۖ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً ۚ قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي
أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ
وَأَصْلَحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۚ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٥﴾

Artinya: “Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandung dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan”.

Selanjutnya Surat Luqman ayat (14) yang artinya : “Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun”.

Ayat pertama tersebut menjelaskan masa kehamilan dan masa menyusui digabungkan menjadi 30 (tiga puluh) bulan. Tidak dirinci dalam ayat ini, berapabulan masa hamil dan berapa bulan masa menyusui dan ayat kedua tersebut menjelaskan masa menyusui selama dua tahun (24 bulan). Ayat ini dianggap sebagai penjelasan dari masa menyusui yang disebut secara global dalam ayat pertama diatas, sehingga dapat disimpulkan bahwa 30 bulan setelah dikurangi bulan masa menyusui, sisanya tinggal enam bulan sebagai masa minimal kehamilan.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Soedaryo Soimin mengatakan bahwa dalam Hukum Islam, anak yang sah dilahirkan sekurang-kurangnya enam bulan (177 hari) semenjak pernikahan orang tuanya, tidak peduli apakah anak itu lahir sewaktu orang tuanya masih terikat dalam perkawinan ataukah sudah berpisah karena wafatnya si suami, atau karena perceraian di masa hidupnya. Dan jika anak itu lahir sebelum genap jangka waktu 177 hari maka anak itu hanya sah bagi ibunya”.⁷³

Sedangkan menurut Aswadi Syukur menyebutkan bahwa para fukaha menetapkan suatu tenggang waktu kandungan yang terpendek adalah 180 (seratus delapan puluh) hari.⁷⁴ Seluruh mazhab fikih, baik mazhab Sunni maupun Syi’ah sepakat bahwa batas minimal kehamilan adalah enam bulan. Sedangkan dalam hal penghitungan antara jarak kelahiran dengan masa kehamilan terdapat perbedaan.

Menurut kalangan Mazhab Hanafiah dihitung dari waktu akad nikah dan menurut mayoritas ulama dihitung dari masa adanya kemungkinan mereka bersenggama.⁷⁵ Berdasarkan pendapat diatas, anak yang dilahirkan pada waktu kurang dari enam bulan setelah akad nikah seperti dalam aliran Mazhab

Abu Hanifah, atau kurang dari enam bulan semenjak waktunya kemungkinan senggama seperti pendapat mayoritas ulama adalah tidak dapat dinisbahkan kepada laki-laki atau suami wanita yang melahirkannya. Hal itu menunjukkan bahwa kehamilan itu bukan dari suaminya. Dalam hal ini

⁷³ Soedaryo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat, Hukum Islam dan Hukum Adat*, (Jakarta : PT. Sinar Grafika, 1992), hlm. 46.

⁷⁴ Asywadi Syukur, *Intisari Hukum Perkawinan dan Kekeluargaan dalam Fikih Islam*, (Suabaya : PT. Bina Ilmu, 198 5), hlm. 32.

⁷⁵ 2 H.M. Zuffran Sabrie, *Analisa Hukum Islam Tentang Anak Luar Nikah*, (Jakarta : Departemen Agama RI, 1998), hlm. 65

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Wahbah az-Zuhulaili berpendapat, anak tersebut tidak bisa dinisbahkan kepada suami perempuan itu. ⁷⁶Tidak sahnya seorang anak untuk dinisbahkan kepada suami ibunya mengandung pengertian bahwa anak itu dianggap sebagai anak yang tidak legal, tidak mempunyai nasab sehingga tidak mempunyai hak sebagaimana layaknya seorang anak terhadap orang tuanya.

Untuk memastikan bahwa anak adalah sungguh-sungguh anak ayahnya (dapat dinisbahkan kepada suami ibunya) yang sah, para fukaha menetapkan ada tiga dasar yang dapat digunakan untuk menentukan anak yang sah atau tidak yaitu :

- a. Tempat tidur yang sah (*Al-Firasyus Shahih*), yang dimaksud dengan tempat tidur yang sah adalah adanya tali perkawinan yang sah antara ayah dan ibu si anak semenjak mulai mengandung, maka apabila bayi yang dalam kandungan itu lahir, keturunannya dihubungkan kepada kedua orang tuanya, tidak diperlukan lagi adanya pengakuan dari pihak si ayah dan bukti-bukti lain untuk menetapkan keturunannya. Dengan adanya tempat tidur yang sah ini sudah cukup sebagai alasan untuk menetapkan bahwa anak yang ada adalah anak yang sah.
- b. Pengakuan. Seorang anak yang sah dapat ditetapkan dengan melalui pengakuan dengan syarat :
 - 1) Orang yang diakui itu tidak dikenal keturunannya;
 - 2) Adanya kemungkinan orang yang diakui itu sebagai anak bagi orang yang mengakuinya;

⁷⁶ Ibid., hlm. 67-68.

3) Pengakuan itu dibenarkan oleh anak yang diakuinya.

Apabila syarat-syarat itu telah dipenuhi maka anak yang diakui itu Sebagai anak sah dari yang mengakuinya.

- c. Saksi. Keturunan anak yang sah dapat juga ditentukan dengan adanya bukti yang konkret seperti adanya dua orang saksi laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang wanita. Apabila seseorang mengakui bahwa seseorang yang lain adalah anaknya yang sah sedang orang yang diakui itu menolak, maka yang mengakui dapat mengemukakan dua orang saksi sebagai bukti dan Hakim memutuskan bahwa orang yang diakui itu adalah anak yang sah.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat dikatakan bahwa status hukum anak hasil dari perkawinan wanita hamil menurut Hukum Islam adalah apabila anak tersebut lahir sekurang-kurangnya enam bulan dari pernikahan yang sah kedua orang tuanya, maka anak tersebut adalah anak sah dan dapat dinasabkan kepada kedua orang tuanya. Sedangkan apabila anak itu lahir kurang dari enam bulan sejak pernikahan yang sah kedua orang tuanya, maka anak tersebut adalah anak yang tidak sah dan tidak dapat dinasabkan kepada kedua orang tuanya. Anak ini hanya mempunyai hubungan nasab kepada ibunya saja.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah penulis paparkan mengenai Hak Waris Anak Hasil *Watha' Syubahat* perfektif fiqih kontemporer maka ada beberapa hal yang dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Hukum yang mengatur tentang peralihan harta warisan dari pewaris kepada ahli waris dinamakan hukum kewarisan, yang dalam Hukum Islam dikenal dengan beberapa istilah seperti : *faraidl*, Fiqih Mawaris, dan lain-lain. kewarisan adalah suatu ilmu yang dengan dialah dapat kita ketahui orang yang menerima pusaka, orang yang tidak menerima pusaka, serta kadar yang diterima tiap-tiap waris dan cara membaginya.
2. Anak dalam Islam adalah sebagai penerus keturunan yang akan mewarisi semua yang dimiliki oleh orang tuanya. Islam juga memerintahkan menjaga kesucian keturunan mereka, karena mereka adalah khalifah di muka bumi. Kedudukan anak dalam Islam sangatlah penting, bagaimana hubungan nasab hubungan darah antara anak dan orang tua adalah hubungan keperdataan yang paling kuat yang tidak bias diganggu gugat dan dibatasi oleh apapun. Oleh karena itu diperlukan kejelasan nasab seorang anak karena akan membawa akibat hukum pada anak tersebut yang juga menyangkut hak dan kewajiban yang diperoleh dan harus dilaksanakan karena mempunyai kekuatan hukum yang sah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

B. Saran

3. *Watha' syubahat* adalah suatu perbuatan yang bisa menggugurkan seseorang terhadap hukum (*had*). Contoh persetubuhan yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan karena menyangka bahwa yang di setubuhi adalah istrinya sendiri.
1. Bagi mahasiswa, skripsi ini semoga dapat memberikan referensi baru bagi peneliti selanjutnya. Skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan. Oleh sebab itu, peneliti menghimbau kepada mahasiswa lain yang berminat untuk meneliti mengenai kewarisan hendaknya lebih memahami lebih mendalam sehingga dalam menganalisis data dapat menghasilkan data akurat.
2. Pengembangan hukum yang berkaitan dengan waris anak dari *watha' syubahat*, merupakan pernikahan *fasakh* pada perbuatan, serta penjaminan hak-hak anak harus ada. Tidak ada seorang anak yang meminta untuk dilahirkan dalam keluarga yang bermasalah, masyarakat dan lembaga yang terkait yang mempunyai tanggung jawab menjaga hak anak.

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Sabuni Muhammad Ali, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h.33
- Al-Birudin, Asikin, Zainal. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Anton Bakker. *Metode Filsafat* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986).
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ar-Lukman, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi ke-2 (Jakarta: Balai Pustaka, 1995).
- Kasiram, Moh. 2010. *Metodologi Penelitian Refleksi Pengembangan Pemahaman Dan Penguasaan Metodologi penelitian*, cet II. Malang: UIN Malik Press.
- Masyuri dkk. *Metodologi Penelitian* (Bandung: Rafika Aditama, 2008).
- Rofiq Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-4, 2000), h. 355
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Soehadha, Moch. 2008. *Metodologi Sosiologi Agama*. Yogyakarta: Teras.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi (Jakarta: Rineka Cipta, 1998).
- Yunus Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990) Cet Ket-8. h. 496
- Zuhaili Wahbah, *Fiqh Imam Syafi'i*, Jld 3, terj. M. Afifi & Abdul Hafiz, Jakarta: Al Mahira, 2012.
- Muhammad Abu Zahrah dalam kitab “*Muṣārabah fī Aqdi az-Zawāj wa Aṣāriḥ*”, dimuat dalam <http://www.referensimakalah.com/2013/02/pengertian-wathi-subhat.html>, diakses pada tanggal 15 September 2017.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta : PT. Lentera Hati, 2004).
- UU No.3 tahun 1997, *Tentang Peradilan Anak*, Tercantum Dalam Pasal 1 ayat (2).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Wahyono Projodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1983).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), cet. ke-2.
- Harar M, *Hukum Kewarisan Islam*, Riau: Suska Pers, 2014
- Departemen Agama Republik Indonesia, h.77.
- Ahmad Mustafa al Maraghi, *Tafsir al Maraghi*, (Mesir : Mushthafa al Bab al Halaby, 1974), cet. ke-2, h. 345
- Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1997).
- Abdullah Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim Sahih *Fikih Sunnah* (Penterjemah Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh), (Jakarta, Pustaka Azzam, 2007).
- Ahmad Zahari, *Hukum Kewarisan Islam*, (Pontianak : FH Untan Press, 2008).
- Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta : Gunung Agung, 1984).
- H.R.Otje Salman S, Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: PT.Refika Aditama, 2006).
- Amien Husain Nasution, *Hukum Kewarisan analisis Komperatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2012), cet. ke-1, h.78
- Mahibbin, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), cet. ke-1, h.78
- Fachur Rahman, *Ilmu Waris*, Penerbit Al-Ma'arif Bandung, 1981, h.
- Imam al Bukhari, *Sahih al Bukhari*, (Tt: Dar al Fikr, 1981 M \ 1401 H), Juz 7, cet. ke- 1, h.11 Lihat juga Imam Muslim, *Sahih Muslim*, (Bairut Libanon : Dar al Kutub al Ilmiyah, 1971), cet. ke-1, h.627
- UU No.3 tahun 1997, *Tentang Peradilan Anak*, Tercantum Dalam Pasal 1 ayat (2).
- Abdul Manan, *Aneka Masalah hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006).
- Mhammad Yusuf Ishaq, *Pernikahan Wanita Hamil karena Zina menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Banda Aceh : IAIN Jami'ah Ar-Raniry, 1983).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Herusko, *Anak di Luar Perkawinan*, Makalah pada Seminar Kowani, Jakarta, 1996.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Juzu' II*, Mathba'ah al-Baby Al-Halaby, Kairo, 1950.
- Muhammad Jawad Mugniyah, *Al-Fiqhu Madzhabil al-Khamasah*, terjemahan Afif Muhammad, (Jakarta : Basrie Press, 1994).
- Abdul Hakim bin Amir Abdat, www.almanhaj.or.id, diakses pada tanggal 20 Pebruari 2011.
- Lots Ma'luf, *al-Munjid*, (Beirut, al-Mathba'ah al-Katsolikiyyah, t.th), hal. 1019 dan 99.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta : PT. Lentera Hati, 2004).
- Soedaryo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat, Hukum Islam dan Hukum Adat*, (Jakarta : PT. Sinar Grafika, 1992).
- Asywadi Syukur, *Intisari Hukum Perkawinan dan Kekeluargaan dalam Fiqih Islam*, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 198 5).
- H.M. Zuffran Sabrie, *Analisa Hukum Islam Tentang Anak Luar Nikah*, (Jakarta : Departemen Agama RI, 1998).
- Muhammad Ruwwas Qalaji, *Mausu'ah Fiqih Umar bin Khattab*, hlm. 297.
- Yasan Sudarto, *hukum pidana*, (Semarang: Fakultas Hukum UNDIP Semarang, 1990), Cet. 11.
- far, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali, (terj: Masykur A.B, dkk), cet. 18, (Jakarta: Lentera, 2006), hlm. 389
- Imam Abu Bakar Ibnu Sayyid Muhammad Syata al-Dimyati, dalam kitabnya "*I'ānah al-Ṭālibīn*", dimuat dalam <http://taklimtanahmerah.com/konsultasi-agama-2/nikah/703-doc-699-macam-macam-wathi-syubhat.html>, diakses pada tanggal 15 September 2017.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*.
- Abdul Fattah Mahmud Idris, dkk, *Qadāya Fiqhiyyah Mu'āṣirah wa Fiqh al-Bunūk al-Islamiyyah*, ed. In, Pengetahuan Islam Kontemporer, (terj: Addys Aldizar), (Jakarta: Pustaka Dinamika, 2014).
- H.M Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta: Amzah, 2013).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sultan Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **"HAK WARIS ANAK HASIL WATHA' SUBAHAT PERSFEKTIF FIQIH KONTEMPORER"**, yang ditulis oleh:

Nama : Deni Putra
NIM : 11721100454
Program Studi : Hukum Keluarga

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 06 Agustus 2020
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H.Akmal Abdul Munir, Lc, MA

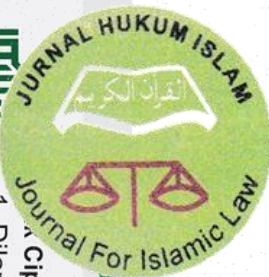
Sekretaris
Yuni Harlina, M.Sy

Penguji I
Dr. H. Suhayib, M.Ag

Penguji II
Dr. H. Johari, M.Ag

Mengetahui :
Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag
NIP. 19750801 200701 1 023



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

Hp. 081275158167 - 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Deni Putra
 NIM : 11721100454
 Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsyah)
 Judul : HAK WARIS ANAK DARI WATHA' SYUBAHAT
 PERSPEKTIF FIQIH KONTEMPORER

Pembimbing : Hairul Amri M.Ag,

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 16 Agustus 2021

Pimpinan Redaksi,



Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H., CPL
 NIP. 198804302019031010



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Assalamualaikum Wr. Wb



Deni Putra, kelahiran Ranah, 08 Februari 1999.

Beralamat di Desa Bukit Ranah, Kecamatan Kampar, merupakan anak dari Bapak Tarmizi dan Ibu Darniati, serta anak kedua dari tiga bersaudara. Penulis menyelesaikan jenjang pendidikan TK Tunas Baru Desa Bukit Ranah pada tahun 2005. Selanjutnya menyelesaikan pendidikan di SDN 005 Bukit Ranah pada tahun 2011. Berikut penulis menyelesaikan pendidikan tingkat MTS di Pondok As-salam Naga Beralih Kampar Utara pada tahun 2014, kemudian penulis melanjutkan pendidikan jenjang SMA di sekolah yang sama Pondok Pesantren As-salam Naga Beralih pada tahun 2017, dan sekarang penulis menyelesaikan tingkat S1 di Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau pada Fakultas Syari'ah dan Hukum dengan jurusan Hukum Keluarga pada tahun 2021, penulis juga Praktek Kerja Lapangan (PKL) semester V di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1B (PA)

Alhamdulillah atas berkat” Hak Waris Anak Dari Hasil Watha’ Syubahat Persfektif Fiqih Kontemporer” Di bawah Bimbingan Bapak Hairul Amri, M.Ag dan resmi lulus dengan gelar Sarjana Hukum (SH) Tanggal 06, Agustus 2021.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.